

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki penduduk tertinggi nomor empat di dunia yaitu 270,6 juta jiwa pada tahun 2019. Penduduk Indonesia sebanyak 1,28 juta pada tahun 2019 merupakan penduduk miskin dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 26,42 juta dengan presentase 9,78%. Kota Semarang ialah ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin sebesar 73,65 ribu jiwa atau 4,14% pada tahun 2018. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki. UU Nomor 23 tahun 2014 menjadikan adanya penyerahan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan pelayanan, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang berdasarkan RPJMD 2016-2021 memiliki inovasi Gerbang Hebat (Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama Masyarakat) salah satu programnya adalah kampung Tematik. Kampung tematik merupakan upaya pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal masyarakat miskin dan prasarana dasar permukiman dengan menonjolkan potensi atau ikon dari kampung tersebut.

Kampung tematik akan berdampak pada ekonomi, edukasi, ekosistem dan etos. Ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Edukasi masyarakat berkaitan dengan masyarakat memahami karakteristik wilayah, memetakan dan mengangkat potensi yang ada. Ekosistem berkaitan dengan mengidentifikasi potensi dan permasalahan lingkungan permukiman dengan memberdayakan masyarakat setempat. Etos yang berkaitan dengan sikap, karakter, dan semangat gotong royong masyarakat untuk peduli membangun dan merawat lingkungannya.

Pembentukan kampung tematik Kota Semarang mempertimbangkan potensi lokal sebagai karakter kampung tematik dengan tujuan mengembangkan potensi kampungnya sekaligus mengatasi permasalahan lingkungan permukiman serta kemiskinan. Pembentukan kampung tematik di Kota Semarang diawali melalui Bappeda Kota Semarang sebagai perencana dan fasilitator serta pihak kecamatan sebagai pelaksana. Pentahapan program Kampung Tematik di Kota Semarang yaitu pada tahun 2016 sebanyak 32 kampung, tahun 2017 sebanyak 80 kampung, pada tahun 2018 sebanyak 65 kampung, dan pada tahun 2019 sebanyak 32 kampung. Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup pada salah satu kampung tematik yaitu kampung tematik *home industry* yang terbentuk pada tahun 2016 sebagai angkatan pertama. Kampung tematik *home industry* terletak di RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari. Kampung tematik ini dibentuk atas dasar banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebagai pelaku UMKM sehingga menjadi potensi yang ditonjolkan dan karakteristik wilayah sebagai kampung tematik. Kampung tematik *home industry* selama ini terkenal akan potensi usahanya di bidang tas rajut, lumpia, dan olahan makanan.

Tabel 1.1
Kampung Tematik Kota Semarang Tahun 2016

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nama Tematik
1.	Semarang Tengah	Miroto	Miroto Paru-Parune Kutho
		Kranggan	Lumpia
2.	Semarang Utara	Kuningan	Sehat Ramah Anak
		Tanjung Mas	Hidroponik
3.	Semarang Selatan	Lamper Tengah	Tahu Tempe Gumregah
		Pleburan	Taman Jahe
4.	Semarang Timur	Rejomulyo	Batik
		Mlatiharjo	Ciliwung Gumregah
5.	Semarang Barat	Krapyak	Agro
		Gisikdrono	Pelayanan
6.	Ngaliyan	Purwoyoso	Serasi Berimbang
		Bringin	Beringin Berseri
7.	Tugu	Mangunharjo	Kampung Mangut
		Tugurejo	Keset Perca
8.	Mijen	Mijen	Anggrek
		Wonolopo	Jamu
9.	Genuk	Bangetanyu Kulon	Jajan Pasar
		Bangetayu Wetan	Bebas Jentik
10.	Pedurungan	Palebun	Seni
		Tlogomulyo	Sari Mulyo
11.	Gayamsari	Gayamsari	Kreatif
		Tambakrejo	Sentra Bandeng
12.	Tembalang	Tandang	Ramah Lingkungan
		Sendangguwo	Bunga Ronce
13.	Banyumanik	Pudakpayung	Jajan Pasar
		Gedawang	Susu Perah
14.	Gunungpati	Gunungpati	Alam Malon
		Sukorejo	Jawi
15.	Gajahmungkur	Lemponsari	Beliksari
		Bendan Nduwur	Kamsoli
16.	Candisari	Karanganyar Gunung	<i>Home industry</i>
		Wonotingal	Organik

Sumber: Bappeda Kota Semarang dan Gerbang Hebat Semarang, 2017

Pembentukan kampung tematik *home industry* juga atas dasar peningkatan kualitas lingkungan. Perbaikan kualitas lingkungan ini akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta terciptanya sentra *home industry* yang didukung dengan lingkungan yang indah, bersih, dan asri untuk menunjang para pengunjung. Kelurahan Karanganyar Gunung khususnya RT 10, 07, 04 RW 5

memang masih sangat kurang prasarana berupa jalan belum beraspal dan banyak jalan berlubang sehingga untuk menuju jalan ke arah sentra pelaku ukm belum optimal. Jalan yang berpaving juga rusak. Berikut dokumentasi kondisi lingkungan sebelum adanya pembentukan kampung tematik *home industry*.

Gambar 1.1
Kondisi Lingkungan RW 5 Kelurahan Karanganyar Gunung sebelum adanya Kampung Tematik



Sumber: Bappeda, 2017

Pembentukan kampung tematik *home industry* merupakan salah satu langkah Pemerintah Kota Semarang untuk memberdayakan masyarakat RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung. Mardikanto dan Soebianto (2019: 100) menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan sehingga terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Pemberdayaan berarti mendayagunakan masyarakat yang sebelumnya *powerless* menjadi *powerful*. Perwal Kota Semarang Nomor 22 tahun 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kampung Tematik, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik dapat disinergikan dengan anggaran lain seperti pemberdayaan perempuan, forum kesehatan kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, fasilitasi pembinaan kesejahteraan keluarga, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan, fasilitasi penanggulangan kemiskinan, dan lain-lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan kampung tematik.

Kampung tematik inisiasi Pemkot Semarang memiliki anggaran senilai Rp 200.000.000 untuk meningkatkan potensi dan memecahkan permasalahan yang telah direncanakan pada proposal kampung tematik. Anggaran ini dikucurkan dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Bappeda mengemukakan bahwa dana tersebut tentu terbatas dan tidak bisa mengatasi semua masalah dan mengangkat potensi yang ada di kampung tematik *home industry* sehingga dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* dapat disinergikan dengan anggaran lain yang ada di perangkat daerah, swadaya masyarakat, atau CSR. Berikut dokumentasi pembangunan fisik serta perbaikan kualitas lingkungan di kampung tematik *home industry* :

Gambar 1.2
Foto Gapura Kampung Tematik *Home industry*



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1.3
Perbaikan Kualitas Lingkungan Kampung Tematik *Home industry*



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan *pilot study* yang peneliti lakukan, pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* memiliki beberapa kendala pada tiap tahapan pemberdayaan. Tahapan pemberdayaan dibagi menjadi tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Beberapa fenomena yang ditemukan adalah pemangku kepentingan di masyarakat seperti ketua RW serta koordinator kampung tematik tidak mengetahui isi dari proposal dan tidak mempunyai berkas proposal yang diajukan dalam pembentukan kampung tematik. Koordinator kampung tematik *home industry* juga menyatakan bahwa kebingungan dalam keberjalanan kampung tematik *home industry* untuk dibawa kemana karena tidak mempunyai pegangan atau pedoman. Ketidaktahuan akan pedoman tentu akan memengaruhi pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry*.

Pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* masih belum optimal. Pemangku kepentingan di wilayah RW 5 kampung tematik *home industry* belum memfasilitasi pemberdayaan melalui kampung tematik *home industry* secara masif. Belum adanya paguyuban yang terstruktur dan solid turut menjadikan tidak ada partisipasi dan pembahasan lebih lanjut dalam rangka pengembangan kampung tematik *home industry*, sehingga usulan tidak

terakomodasi secara optimal melalui musrenbang. Pelaku ukm kampung tematik *home industry* turut menyebutkan bahwa memiliki kendala dalam hal pemasaran produk, bantuan modal usaha, serta adanya pendampingan. Sementara pihak pemerintah Kota Semarang telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengkomunikasikan kebutuhan yang dibutuhkan untuk nantinya dapat disinergikan dengan kegiatan yang ada di Pemerintah daerah.

Pada aspek hasil dan keluaran dari pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry*, dari segi sosial belum terbentuk pada masyarakat kampung tematik *home industry*. Kurangnya sifat kepemimpinan pemangku kepentingan di wilayah RW 5 dalam memberikan motivasi dan mengarahkan masyarakat untuk terus berdaya berdampak pada eksistensi kampung tematik, produksi dan pemasaran produk pelaku ukm. Segi ekonomi turut mengalami kendala karena masyarakat kesulitan dalam pemasaran produk dan bantuan modal. Bazar yang difasilitasi oleh Kecamatan nyatanya belum mampu mengatasi permasalahan pemasaran karena perbedaan target pasar produk yang dihasilkan oleh pelaku ukm di kampung tematik *home industry*. Segi infrastruktur telah mengalami perbaikan kualitas lingkungan fisik seperti paving jalan dan kawasan yang lebih tertata. Sanitasi dan penghijauan di wilayah kampung tematik *home industry* sudah merata dan keseluruhan di tiap RT, hal ini hasil sinergi program lain seperti lomba taman toga, namun masih menjadi kendala dalam hal pemeliharaan dan perawatan. Sanitasi seperti grill selokan yang diberikan melalui anggaran senilai Rp 200.000.000 dari kampung tematik mengalami karat dan tidak dapat berfungsi secara optimal.

Pada penelitian terdahulu juga disebutkan berbagai program pemberdayaan masyarakat belum optimal. Penelitian Agus Sulaiman Bolkih (2021) menyebutkan bahwa program bidang pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pamekasan masih kurang optimal karena memiliki anggaran yang terbatas, akses informasi, pengadaan sarana dan prasarana sangat kurang memadai sementara produksi perikanan tangan cenderung meningkat tiap tahun. Penelitian Monica (2021) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Ngargosoko tidak berhasil dilaksanakan karena masih banyak aspek yang tidak tercapai. Aspek yang tidak mendukung antara lain partisipasi, kontrol, dan kesejahteraan. Partisipasi masyarakat masih kurang karena enggan meluangkan waktu. Kontrol berupa pemantauan dan pendampingan hanya dilakukan secara kegiatan berlangsung saja, sebelum dan setelah kegiatan tidak ada. Kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi sandang dan pangan belum tercukupi jika hanya mengandalkan hasil dari panen salak saja. Pada penelitian Karsidi (2020) bertujuan untuk mengevaluasi proses dan hasil pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik mangoet bandarharjo Semarang Utara. Proses pemberdayan menunjukkan bahwa telah sesuai dengan tahapan atau langkah-langkah pemberdayaan sesuai regulasi kampung tematik maupun literatur mengenai pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan melalui kampung tematik mangoet berjalan selama tiga tahun dan berhasil mengubah kesadaran masyarakat dan memberikan pemahaman untuk berpartisipasi dalam pembangunan komunitasnya walaupun belum mencapai tingkat keberdayaan dan kemandirian. Berdasarkan paparan sebelumnya diketahui bahwa permasalahan program pemberdayaan masyarakat masih terjadi di Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu membuktikan bahwa program

pemberdayaan masyarakat kerap belum optimal dan belum mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan dari berbagai penjelasan tersebut, maka peneliti ingin meneliti terkait pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dalam rangka mengubah masyarakat *powerless* menjadi *powerful* dan faktor penghambat apa saja yang terjadi. Peneliti ingin mengambil judul penelitian “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang”.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry* Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry* Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry* Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home*

industry Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari
Kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Peneliti dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait manajemen publik terutama terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini, peneliti bisa bertambah wawasannya dan dapat melengkapi pengetahuan peneliti didapat dari bangku perkuliahan.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta perbendaharaan untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penyusunan penelitian.

3) Bagi Pihak Terikat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk dijadikan acuan penelitian yang relevan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi masyarakat yang luas.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah suatu riset yang dilaksanakan di masa lampau dan dimanfaatkan sebagai rujukan peneliti untuk memperkaya teori dalam kajian penelitian. Berdasarkan studi keputustakaan peneliti, penelitian yang berjudul analisis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang bersifat baru, karena belum ada penelitian serupa sebelumnya, akan tetapi, terdapat beragam penelitian terdahulu yang relevan, seperti pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis, Judul Artikel, dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
(Monica et al., 2021), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Salak di Desa Ngargosoko,	Kualitatif, deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara	Desa Ngargosoko , Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang	Pemberdayaan masyarakat di Desa Ngargosoko tidak berhasil dilaksanakan karena masih banyak aspek yang tidak tercapai. Aspek yang tidak mendukung antara lain partisipasi, kontrol, dan kesejahteraan. Partisipasi masyarakat masih kurang karena	Penelitian tidak menyebutkan penelitian terdahulu dan tidak terdapat teori terkait faktor pendorong dan faktor penghambat dalam	Hasil dan pembahasan dianalisis menggunakan dimensi keberhasilan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dimana belum banyak artikel

Nama Penulis, Judul Artikel, dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. <i>Journal of Public Policy and Management Review.</i>	dan dokumentasi.		enggan meluangkan waktu. Kontrol pemantauan dan pendampingan dilakukan saat kegiatan berlangsung saja. Kesejahteraan masyarakat belum tercukupi jika hanya mengandalkan hasil dari panen salak saja.	pemberdayaan masyarakat.	terdahulu yang membahas menggunakan operasionalisasi tersebut.
Anissa Kinanti (2019), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus Kampung Tahu Tempe Gumregah di Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang), <i>Journal of Politic and Government Studies.</i>	Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.	Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah di Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang	Pelaksanaan program kampung tematik di Kelurahan Lamper tengah dalam rangka mengentaskan kemiskinan belum berjalan maksimal. Indikator keberhasilan pemberdayaan yaitu modal sosial yang menyangkut hubungan internal masyarakat kampung tahu tempe. Masyarakat belum memanfaatkan faktor-faktor pendukung secara maksimal.	Penelitian tidak menyebutkan penelitian terdahulu dan membahas teori pemberdayaan secara mendalam. Artikel ini tidak memiliki bagian saran atau rekomendasi.	Hasil dan pembahasan pada penelitian ini meliputi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat, dan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Nama Penulis, Judul Artikel, dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
As Sabilla Haqqi Mantovani, Maesaro (2018), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus	Kualitatif, Deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus	Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Jati Kulon belum merata. Desa Jati kulon telah mandiri dalam pengangkutan sampah hingga pengelolaannya dengan terus berinovasi, sehingga kegiatan ini membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Masyarakat telah memiliki kesadaran akan tanggungjawab sosial dan lingkungan atas kegiatan pemberdayaan masyarakat. Faktor pendorong yaitu keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang semakin berubah dan adanya inovasi sebagai peluang. Faktor penghambat meliputi pekerjaan, kemampuan sumber daya manusia, dan bahan utama yang tidak selalu ada.	Penelitian tidak menyebutkan penelitian terdahulu dan tidak terdapat teori terkait faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Daftar pustaka yang digunakan dalam penulisan penelitian yaitu lebih dari lima tahun terakhir.	Penelitian ini menggunakan teori Sumadyo terkait lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan atau yang selanjutnya disebut dengan tri bina.

Nama Penulis, Judul Artikel, dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
Nisa Hafizhotus Syarifa, Atika Wijaya (2019), Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang), <i>Solidarity</i> .	Kualitatif, studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.	Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dapat dilihat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Setelah adanya kampung tematik kesejahteraan masyarakat meningkat dan masyarakat lebih mandiri. Pelaksanaan program Kampung tematik di Kampung Batik belum optimal karena perkembangan yang belum merata di beberapa RT, kurangnya aktor penggerak kegiatan pemberdayaan, serta rendahnya motivasi masyarakat untuk mengembangkan wilayahnya secara swadaya.	Kajian teori pada penelitian ini tidak dibahas secara mendalam. Hanya terdapat teori pemberdayaan masyarakat dilihat dari indikator keberhasilannya menurut Sunyoto Usman. Penelitian ini juga tidak mencantumkan penelitian terdahulu. Daftar pustaka yang digunakan tidak dalam kurun waktu lima tahun terakhir.	Hasil dan pembahasan pada penelitian ini diuraikan secara rinci dengan kutipan hasil wawancara. Terdapat data sekunder berupa tabel produk unggulan Kebumen pada tahun 2009.
Aliffiana, Definta dan Nina Widowati (2018), Upaya Pemerintah Daerah Dalam	Kualitatif, deskriptif.	Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.	Hasil penelitian menyebutkan bahwa upaya pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pemberdayaan sudah berhasil	Artikel ini tidak menyebutkan teknik pengumpulan data yang dipakai. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara,	Kerangka teori pada artikel ini sangatlah lengkap dan runtut, yang diawali dengan kerangka teori administrasi publik,

Nama Penulis, Judul Artikel, dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industry Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> .			namun belum maksimal karena beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masih ada yang belum bisa diberikan oleh pemerintah seperti bantuan dana sebagai modal usaha para pelaku usaha UMKM konveksi dan bordir.	dokumentasi dan observasi.	manajemen publik, pemberdayaan, indikator pemberdayaan dan karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Luisi, Daniela dan Kerstin Hamel. (2020). Community Participation and empowerment in primary health care in Emilia-	Kualitatif, studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi.	Emilia-Romagna.	Wilayah emilia-romagna memperkenalkan <i>casa della salute</i> (sejenis rumah sakit) yang bertujuan untuk mendorong perawatan kesehatan primer yang komprehensif dan mendukung partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Hasil	Artikel ini tidak memiliki bagian saran atau rekomendasi. Saran merupakan unsur penting dalam penelitian yang berkaitan dengan	Penelitian membahas terkait kekuasaan, demokrasi, dan ruang publik: dimensi politik partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah emilia-romagna melalui

Nama Penulis, Judul Artikel, dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
Romagna: A document analysis study. <i>Health Policy</i> .			dari analisis dokumen menunjukkan bahwa perlunya praktik demokrasi dan berbagi kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan juga hanya menunjukkan bagaimana memberdayakan masyarakat namun strategi untuk mendorong partisipasi kelompok rentan masih kurang.	sumbangan pemikiran penulis dalam rangka pemecahan masalah yang diteliti.	casa della salute. Penelitian ini memiliki <i>novelty</i> karena teori yang digunakan belum banyak ditemui pada penelitian lain.
Farida, Umi, Bustamin, Eko Wagiyanto, dan Rudi Salam. (2017). Analysis of empowerment program that was implemented in mamuju regency East Sulawesi Indonesia. <i>Atlantis Press</i> .	Kualitatif, deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Kabupaten Mamuju, Sulawesi Timur, Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan PNPM sudah berjalan cukup baik. Aparat lokal tingkat kabupaten dan desa dilakukan dengan komunikasi transparan, terbuka, dan konsisten. Namun, penerima manfaat tidak benar-benar memahami detail dari program itu sendiri. Sumber daya manusia, informasi, dan keuangan untuk pelaksanaan program sudah memadai. Namun, fasilitas masih kurang memadai. Disposisi antar pihak yang terlibat sudah cukup	Artikel ini tidak memiliki bagian saran atau rekomendasi. Saran merupakan unsur penting dalam penelitian yang berkaitan dengan sumbangan pemikiran penulis dalam rangka pemecahan masalah yang diteliti.	Penelitian ini melihat keberhasilan pemberdayaan melalui program PNPM berdasarkan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Nama Penulis, Judul Artikel, dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
			baik. Struktur birokrasi program sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional serta tanggung jawab.		
Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, dan Ani Prasetyawati. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. <i>Sosioglobal</i> .	Kualitatif, deskriptif. Teknik pengumpuln data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Desa Bumiaji.	Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata untuk dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat. Desa wisata di Bumiaji memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat. Sehingga program pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata dapat dikatakan berhasil dan dijadikan sebagai rujukan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.	Artikel ini tidak memiliki bagian saran atau rekomendasi. Saran merupakan unsur penting dalam penelitian yang berkaitan dengan sumbangan pemikiran penulis dalam rangka pemecahan masalah yang diteliti.	Penelitian ini melihat pemberdayaan masyarakat berdasarkan teori Kartasasmita. Pemberdayaan dilihat dari menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dan memberdayakan berarti melindungi.
Cristina, Heppi Marta. (2020). Community Empowerment	Kualitatif, deskriptif. Teknik pengumpulan	Desa Sitomulyo, Kecamatan	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan OVOP (<i>one village</i>	Artikel ini tidak memiliki bagian saran atau rekomendasi. Saran	Artikel ini membandingkan penelitian terkait OVOP (<i>one village one</i>

Nama Penulis, Judul Artikel, dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
Program To Increase Community Income in Sitimulyo Village, Piyungan District, Yogyakarta. <i>Jurnal Penelitian Humaniora.</i>	data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Piyungan, Yogyakarta.	<i>one product</i>) diketahui bahwa program pemberdayaan masyarakat meningkatkan pendapatan masyarakat. pemberdayaan masyarakat tidak hanya menciptakan satu produk tetapi juga memberikan ketrampilan pelatihan dan kewirausahaan. Keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan hidup yang didominasi oleh tingkat konsumsi, gaya hidup, kondisi sosial budaya, dan tanggungan keluarga menjadikan peningkatan pendapatan berjalan lambat.	disampaikan oleh penulis pada bagian kesimpulan di paragraf terakhir. Seharusnya saran diberikan pada bagian khusus dan tidak tergabung dalam kesimpulan karena saran merupakan unsur penting dalam penelitian yang berkaitan dengan sumbangan pemikiran penulis dalam rangka pemecahan masalah yang diteliti.	<i>product</i>) di berbagai negara di Asia. Sehingga pembaca dapat mengerti bagaimana pelaksanaan OVOP di manca negara. Artikel ini juga menyebutkan penelitian terdahulu sebagai <i>state of the art</i> .
Putra, Wegi Trio, dan Ismaniar. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui	Kualitatif, deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi,	Kecamatan Kuranji Kota Padang	Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat di bank sampah panca daya Kecamatan Kuranji Kota Padang melalui beberapa tahapan yaitu pemungkinan, penguatan,	Artikel ini tidak memiliki bagian saran atau rekomendasi. Hasil temuan penelitian diketahui tidak ada	Konsep pemberdayaan masyarakat yang diuraikan sangat lengkap. Hal ini terlihat dari defisini pemberdayaan

Nama Penulis, Judul Artikel, dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. <i>Jambura Journal of Community Empowerment.</i>	wawancaram dan dokumentasi.		perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.	masalah dan proses pemberdayaan berhasil. Seharusnya perlu dibahas lebih lanjut analisis faktor apa saja yang mendorong keberhasilan pemberdayaan masyarakat sehingga penelitian memberikan sumbangan manfaat yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan.	masyarakat dari para ahli yang beragam.

Sumber: Peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu pada Tabel 1.2 dapat diidentifikasi beberapa *research gap*. *Research gap* dikemukakan oleh Alvesson dan Sandberg (dalam Muslim & Perdhana, 2018: 32) ialah permasalahan yang belum tuntas diteliti atau belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. *Research gap* menjadikan sebuah penelitian unik dan berbeda dari satu riset dengan riset lain. Berikut perbedaan penelitian yang ditemukan yaitu dalam menganalisis program pemberdayaan masyarakat. Mayoritas penelitian terdahulu membahas analisis program pemberdayaan masyarakat dilihat dari indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Penelitian terdahulu juga berfokus pada konsep analisis pemberdayaan masyarakat namun sedikit sekali yang membahas tentang faktor pendorong atau faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada analisis pemberdayaan melalui kampung tematik *home industry* dengan mendeskripsikan fenomena yang ada menggunakan tahapan pemberdayaan yang meliputi tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Penelitian ini juga mendeskripsikan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry*.

1.5.2. Administrasi Publik

Herbert A. Simon 1993 (dalam Pasolong, 2007: 2) mengemukakan bahwa administrasi yaitu kegiatan kelompok kerjasama agar terwujudnya tujuan kolektif. Kegiatan tersebut adalah pekerjaan yang terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sekelompok orang yang bekerjasama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Syafi'i (dalam Pasolong, 2007: 6) menjelaskan publik ialah manusia yang

mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, cita-cita, sikap dan tindakan yang benar menurut nilai norma yang mereka miliki. Nicholas Henry menetapkan batasan dalam memaknai administrasi publik, yaitu gabungan kompleks dari teori dan praktik yang bertujuan mengkomunikasikan pemahaman peran pemerintah dengan masyarakat sebagai publik. Sehingga kebijakan publik dapat berjalan secara responsif dan memenuhi kebutuhan sosial.

Berdasarkan uraian dari para ahli, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa administrasi publik ialah ilmu memahami hubungan pemerintah dengan publik yang bertujuan meningkatkan responsibilitas kebijakan serta melembagakan praktik manajerial sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif, rasional dan efisien. Selain itu, juga dapat dimaknai sebagai proses kerjasama individu secara kolektif atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik seperti memberikan pelayanan yang dilakukan secara efektif, efisien dan memperhatikan nilai moral dalam masyarakat. Di dalam administrasi publik terdapat ilmu manajemen dan organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga dan atau pemerintahan.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan sekumpulan teori yang memiliki cara pandang yang sama. Telah terjadi enam paradigma dalam administrasi publik menurut Henry (Ikeanyibe et al., 2017: 3) antara lain :

1. Paradigma 1 (1900-1926)

Paradigma 1 atau paradigma dikotomi politik dan administrasi yang dibawa oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White menekankan lokus

daripada fokusnya. Lokus dari paradigma ini adalah *government bureaucracy*.

2. Paradigma 2 (1927-1937)

Paradigma 2 atau paradigma prinsip-prinsip administrasi dibawa oleh Willoughby Gullick dan Urwick. Pada paradigma ini fokusnya lebih ditekankan daripada lokusnya. Hal ini karena pada paradigma ini menganggap bahwa lokus dapat dilakukan dimanapun termasuk di sektor pemerintahan.

3. Paradigma 3 (1950-1970)

Dikenal dengan paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik, di mana administrasi publik mengalami krisis identitas dan ilmu politik sangat dominan dalam dunia administrasi publik (Keban, 2014: 33). Lokus dalam paradigma ini lebih diutamakan daripada fokus. Lokus dari paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan.

4. Paradigma 4 (1956-1970)

Paradigma ini dikenal dengan paradigma administrasi publik sebagai manajemen. Pada paradigma ini lokus menjadi tidak jelas dan lebih mementingkan fokus. Fokus lebih diperhatikan disini karena manajemen dapat diterapkan di dunia administrasi publik tidak hanya di dunia bisnis.

5. Paradigma 5 (1970-Sekarang)

Paradigma 5 yaitu paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya

adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik (Keban, 2014: 33).

6. Paradigma Governance (1990-Sekarang)

Paradigma governance merupakan suatu bentuk reformasi mengubah orientasi yang dilakukan sebelumnya yaitu menekankan arti penting kesetaraan antara institusi negara, swasta dan masyarakat dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip *good governance*. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana warga negara dapat mengartikulasikan kepentingannya, pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta memainkan perannya menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan (Ikeanyibe et al., 2017: 11). Pada paradigma ini terdapat tiga isu penting yaitu *partnership*, *networking*, dan *collaboration*. Orientasi administrasi publik yang semua adalah kekuasaan kini menjadi pelayan negara.

Penelitian ini menggunakan paradigma administrasi publik keenam yaitu governance. Pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat serta peran pemerintah dan pihak swasta dalam memberikan tanggung jawab sosialnya untuk dapat mengelola pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berkelanjutan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1.5.4. Manajemen Publik

James A F Stoner (Handoko, 2008: 8) memaknai manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan upaya individu dalam organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan yang

ditentukan. Fungsi manajemen menurut George R. Terry meliputi *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*. Manajemen publik adalah bagian dari administrasi publik yang didalamnya menjelaskan tentang desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumberdaya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia dan evaluasi program dan audit (Ott, Hyde & Shafritz dalam Wijaya, 2014). Dapat disimpulkan bahwa manajemen publik berkaitan dengan penggunaan fungsi-fungsi manajemen baik secara kelompok maupun individu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Garson & Overman (dalam Keban, 2014: 107) mengungkapkan dalam organisasi publik pendekatan PAFHRIER mendapat perhatian dalam rangka manajer sebagai pihak yang melayani publik. Fungsi-fungsi manajemen berdasarkan doktrin PAFHRIER salah satunya adalah manajemen kebijakan. Manajer dalam proses kebijakan secara aktif dalam penentuan program-program yang diusulkan dan ditangani dalam tahun anggaran tertentu. Manajer harus aktif membahas berbagai kelemahan dan kesulitan implementasi kebijakan tahun-tahun sebelumnya untuk penyusunan program pada tahun berikutnya. Koordinasi yang baik, tanpa tumpang tindih, dan tidak melakukan tindakan ganda adalah suatu kunci. Manajer publik harus mendorong agar kebijakan yang diusulkan dapat mengakomodasikan nilai-nilai rasionalitas (aspek teknis), aspirasi berbagai kelompok kepentingan (aspek politik), sehingga suatu usulan diterima masyarakat.

Manajemen publik dalam penelitian ini berperan baik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam upaya memberikan daya atau

penguatan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya fokus manajemen publik salah satunya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1.5.5. Pemberdayaan Masyarakat

Maryani (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Mardikanto dan Soebianto (2019: 100) menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan sehingga terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Pemberdayaan berarti mendayagunakan masyarakat yang sebelumnya *powerless* menjadi *powerful*. Mardikanto (dalam Maryani, 2019: 8) menyebutkan enam tujuan pemberdayaan masyarakat :

1) Perbaiki Kelembagaan

Perbaiki kelembagaan meliputi perbaikan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong partisipasi dari masyarakat dan berdampak pada fungsi dari kelembagaan tersebut. Lembaga yang baik memiliki visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, dan program kerja terarah. Anggota dari kelembagaan juga harus mengambil peran, saling memotivasi dan membagikan kapasitas dan kemampuannya (waktu, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan).

2) Perbaikan Usaha

Perbaikan usaha yaitu mampu memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan memenuhi semua kebutuhan seluruh anggota yang bersangkutan. Perbaikan usaha ini merupakan kelanjutan dari perbaikan kelembagaan.

3) Perbaikan Pendapatan

Perbaikan bisnis akan berdampak pada peningkatan pendapatan anggota lembaga tersebut. Peningkatan pendapatan merupakan perbaikan pendapatan.

4) Perbaikan Lingkungan

Perbaikan lingkungan meliputi peningkatan kualitas lingkungan seperti penataan lingkungan kumuh, peningkatan penghijauan di lingkungan sekitar, dan memunculkan karakteristik kekhasan wilayah sebagai suatu potensi yang dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan. Perbaikan lingkungan juga berimplikasi dari perbaikan pendapatan. Perbaikan pendapatan turut serta dalam hal memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh pendapatan yang terbatas atau kemiskinan.

5) Perbaikan Kehidupan

Perbaikan kehidupan dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan masing-masing keluarga. Perbaikan kehidupan juga berimplikasi dari perbaikan pendapatan. Pendapatan yang membaik dapat memperbaiki keadaan keluarga atau masyarakat.

6) Perbaikan Masyarakat

Perbaikan masyarakat adalah kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” sehingga terwujud kehidupan kelompok masyarakat yang lebih baik.

1.5.6. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dikatakan sebagai proses karena merupakan suatu proses, maka proses menjadi aspek penting dalam menilai pemberdayaan yang dilakukan, Proses dapat juga dikatakan sebagai tahapan. Terdapat berbagai macam tahapan yang dapat dilakukan untuk menilai, menelaah pemberdayaan yang ada. Tahapan - tahapan dapat dilakukan atau dinilai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan respon dari masyarakat. Sumodiningrat (2002) menyebutkan upaya memberdayakan masyarakat dilihat dari tiga sisi, antara lain :

- a) Menciptakan suasana atau iklim potensi masyarakat berkembang (enabling)

Pemberdayaan ialah upaya membangun daya dengan memberikan dorongan dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan.

- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering)

Pemberdayaan ini dengan menciptakan langkah-langkah nyata seperti peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.

- c) Memberdayakan berarti melindungi

Pemberdayaan yaitu memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik dan berkesinambungan.

Berikut rincian dari tahapan kegiatan pemberdayaan dengan metode pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan dalam Tabel 1.3

Tabel 1.3
Metode Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tahapan Kejadiannya

No.	Tahapan Kegiatan	Ragam Metode Yang Disarankan	Keterangan
1.	Penetapan dan pengenalan wilayah kerja	Pertemuan, Diskusi, FGD, Lokakarya	Semua pemangku kepentingan
2.	Sosialisasi Kegiatan	Percakapan, Media-massa, Media cetak, Pertemuan, FGD	Semua pemangku kepentingan
3.	Penyadaran Masyarakat	Percakapan, Media-massa, Media cetak, Pertemuan, FGD, RRA, PRA	Birokrasi, fasilitator, tokoh masyarakat, LSM
4.	Pengorganisasian Masyarakat	Percakapan, Pertemuan, Lokakarya, FGD, anjangsana, anjang karya	Birokrasi, fasilitator, tokoh masyarakat, LSM
5.	Pelaksanaan Kegiatan	Pelatihan, percakapan anjangsana, anjang karya, sekolah lapang, PLA, Diskusi, FGD, lokakarya	Birokrasi, fasilitator, LSM
6.	Advokasi Kebijakan	Percakapan, FGD, Pertemuan, Lokakarya, anjangsana, Anjang karya.	Semua pemangku kepentingan
7.	Politisasi	Media cetak, media massa, pertemuan, PLA, FGD, Lokakarya	Semua pemangku kepentingan

Sumber : (Mardikanto & Soebianto, 2019)

Nina Mintarti dalam (Habibah, 2009: 18-19) mengemukakan tahapan pemberdayaan meliputi :

1. Penyadaran

Tahap penyadaran yaitu pengenalan lingkungan dan potensi diri serta membantu komunitas untuk melihat keadaan dirinya dengan kekuatan domestik maupun global dalam bentuk teknologi, informasi, budaya, politik hingga modal sosial.

2. Pengorganisasian

Tahap dimana organisasi harus dari prakarsa rakyat secara sukarela serta diadakannya suatu program penguatan organisasi.

3. Kaderisasi

Tahapan ini adalah organisasi menyiapkan kader-kader pengembangan keswadayaan lokal yang mengambil alih tugas, pendampingan setelah program berakhir. Kader terpilih secara partisipatif oleh masyarakat.

4. Dukungan teknis

Tahap pemberdayaan dukungan teknis merupakan proses produksi untuk membantu dalam perbaikan teknologi maupun proses dari pemberdayaan saat sedang dilakukan.

5. Pengelolaan Sistem

Pengelolaan sistem yaitu tahapan memperlancar masyarakat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan baik secara individu maupun secara kelompok.

Tahapan pemberdayaan dijelaskan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:3-6) menjadi tiga tahapan pemberdayaan :

1. Tahap Penyadaran. Tahap ini merupakan tahap memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan dan hak memiliki yang perlu dibangun. Penyadaran dimulai dari diri mereka sendiri yang ingin

untuk berdaya. Hal yang dilakukan adalah memberikan edukasi yang bersifat *belief*, *kognisi*, dan *healing*. Prinsip dasar tahapan ini adalah membuat masyarakat mengerti dan memahami bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses yang dilakukan berawal dari mereka sendiri.

2. Tahap pengkapasitasan. Tahap ini adalah tahap membentuk kemampuan. Pembentukan kemampuan dilakukan setelah masyarakat diberikan kesadaran melalui edukasi dan masyarakat paham dan siap menerima daya yang akan diberikan. Masyarakat diberikan daya sesuai dengan kemampuan individu atau kelompok sehingga dapat menerima daya atau kekuasaan yang diberikan.
3. Tahap Pendayaan. Tahap pendayaan merupakan tahap terakhir yaitu target diberi daya, kekuasaan dan otoritas bahkan peluang sesuai dengan kemampuan serta memberikan akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya diketahui bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat sangat beragam. Tahapan diawali dengan kesadaran untuk berdaya secara sukarela baik secara individu, kelompok, dan lembaga dan diakhiri dengan tahap dapat secara utuh memandirikan masyarakat untuk lebih *powerful* sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Pada penelitian ini dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* menggunakan tahapan pemberdayaan yang meliputi tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

1.5.7. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dapat diteliti menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penggunaan model implementasi kebijakan ini didasarkan pada prinsip evaluasi program itu sendiri, sebagai bahan acuan dalam menentukan keberlanjutan program. Model implementasi yang dikemukakan Edwards memuat empat konsep yang memengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan/program dikomunikasikan kepada pihak lain dan bagaimana sikap dan tanggapan pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut dilakukan agar kebijakan program tersebut dapat dipahami antar pihak yang terlibat baik implementor maupun kelompok sasaran. Tiga fenomena dalam melihat konsep komunikasi antara lain konsistensi, transmisi, dan kejelasan informasi.

b. Sumberdaya

Sumberdaya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dukung untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau karakteristik implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis dalam mengimplementasikan kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi meliputi prosedur dan struktur birokrasi itu sendiri. Prosedur menjadi pedoman wajib implementor dalam melaksanakan kebijakan, sehingga tidak melenceng dari tujuan. Struktur birokrasi yang panjang dapat menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan.

Arini dan Rostyaningsih (2018) pada penelitiannya menyebutkan faktor pendorong dan penghambat program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- a. Sosialisasi
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Peran pendamping
- d. Kondisi dan pemakaian sarana dan prasarana

1.5.8. Kampung Tematik

Pemerintah Kota Semarang berdasarkan inovasi RPJMD 2016-2021 memiliki inovasi Gerbang Hebat (Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama Masyarakat) salah satu programnya adalah kampung Tematik. Kampung Tematik berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 22 tahun 2018 adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung tematik merupakan upaya pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal masyarakat miskin dan prasarana dasar permukiman dengan menonjolkan potensi

atau ikon dari kampung tersebut. Pembentukan kampung tematik memiliki tujuan pelaksanaan yaitu memperbaiki dan mengatasi beberapa hal berikut :

- a. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
- b. Perbaikan lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman
- c. Peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat secara aktif di dalam upaya penanggulangan kemiskinan
- d. Peningkatan potensi lokal yang ada di masyarakat dan lingkungan setempat
- e. Peningkatan kepedulian masyarakat dan membentuk identitas kampung sebagai semangat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat
- f. Memberi pengaruh positif bagi kampung-kampung lainnya agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan kampung tematik serupa
- g. Menggugah pengusaha di dalam memberikan tanggung jawab sosialnya untuk mendukung pelaksanaan kampung tematik di Kota Semarang
- h. Mendorong peningkatan perputaran ekonomi lokal/wilayah
- i. Menambah tujuan atau destinasi wisata

Perwal nomor 22 tahun 2018 Kota Semarang menyebutkan keluaran dan hasil dari pelaksanaan kampung tematik. Hasil dari pelaksanaan kampung tematik meliputi :

- a. Terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan
- b. Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi yang berbasis potensi lokal yang diangkat

- c. Terciptanya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan tertata, dengan terwujudnya.
 - 1. Jalan lingkungan yang baik
 - 2. Saluran air yang baik
 - 3. Sanitasi dan penghijauan yang baik

Pada dasarnya kampung tematik akan berdampak pada ekonomi, edukasi, ekosistem dan etos. Ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Edukasi masyarakat berkaitan dengan masyarakat memahami karakteristik wilayah, memetakan dan mengangkat potensi yang ada. Ekosistem berkaitan dengan mengidentifikasi potensi dan permasalahan lingkungan permukiman dengan memberdayakan masyarakat setempat. Etos yang berkaitan dengan sikap, karakter, dan semangat gotong royong masyarakat untuk peduli membangun dan merawat lingkungannya.

Pembentukan kampung tematik Kota Semarang mempertimbangkan potensi lokal sebagai karakter kampung tematik dengan tujuan mengembangkan potensi kampungnya sekaligus mengatasi permasalahan lingkungan permukiman serta kemiskinan. Pembentukan kampung tematik di Kota Semarang diawali melalui Bappeda Kota Semarang sebagai perencana dan fasilitator serta pihak kecamatan sebagai pelaksana. Pentahapan program Kampung Tematik di Kota Semarang yaitu pada tahun 2016 sebanyak 32 kampung, tahun 2017 sebanyak 80 kampung, pada tahun 2018 sebanyak 65 kampung, dan pada tahun 2019 sebanyak 32 kampung.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.4
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Fenomena
<p>Pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik <i>home industry</i> merupakan suatu kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengubah masyarakat <i>powerless</i> menjadi <i>powerful</i>.</p>	<p>Analisis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik <i>home industry</i> Kota Semarang:</p> <p>a. Tahap Penayadaran yaitu memberikan kesadaran pada masyarakat terkait kondisi lingkungan seperti potensi dan permasalahan. Fenomena yang diamati adalah pemetaan <i>need assessment</i> hasil yang ingin dicapai melalui kampung tematik <i>home industry</i> dan sosialisasi mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik <i>home industry</i>.</p> <p>b. Tahap Pengkapasitasan yaitu kegiatan untuk diberdayakan kecakapan dalam mengelolanya serta menggali kemampuan masyarakat di kampung tematik <i>home industry</i> untuk lebih terampil dan mampu mengambil peluang. Fenomena yang diamati adalah pembentukan kampung tematik <i>home industry</i> dan penurunan anggaran.</p> <p>c. Tahap Pendayaan merupakan tindakan-tindakan yang memberikan peluang kepada masyarakat melalui kampung tematik <i>home industry</i> untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Fenomena yang diamati meliputi pengembangan kampung tematik <i>home industry</i> dan tercapainya keluaran dari pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik <i>home industry</i> yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan (sosial) 2. Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi berbasis potensi lokal yang diangkat (ekonomi) 3. Tercapainya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan tertata, dengan terwujudnya jalan lingkungan yang baik, saluran air yang baik, serta sanitasi dan penghijauan yang baik.

Konsep	Fenomena
Adapun faktor penghambat pada pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik <i>home industry</i> antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.	Adapun faktor penghambat meliputi : a. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada pihak lain dan bagaimana sikap dan tanggapan pihak-pihak yang terlibat (implementor dan kelompok sasaran). b. Sumberdaya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dukung untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. c. Disposisi merupakan sikap atau karakteristik implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis dalam mengimplementasikan kebijakan. d. Struktur birokrasi meliputi prosedur dan struktur birokrasi itu sendiri.

Sumber: Peneliti

1.7. Argumen Penelitian

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki. Adanya UU Nomor 23 tahun 2014 menjadikan adanya penyerahan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Semarang berdasarkan RPJMD 2016-2021 memiliki inovasi Gerbang Hebat dengan salah satu programnya adalah kampung Tematik. Kampung tematik merupakan upaya mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdiri dari peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal masyarakat miskin dan prasarana dasar permukiman dengan menonjolkan potensi atau ikon dari kampung tersebut.

Kampung tematik *home industry* merupakan salah satu kampung tematik yang terbentuk pada tahun 2016 atas dasar banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebagai pelaku UMKM sehingga menjadi potensi yang ditonjolkan dan karakteristik wilayah sebagai kampung tematik. Kampung tematik *home industry* selama ini terkenal akan potensi usahanya di bidang tas rajut, lumpia, dan olahan makanan. Pembentukan kampung tematik *home industry* merupakan salah satu langkah Pemerintah Kota Semarang untuk memberdayakan masyarakat RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung.

Pada penelitian ini fenomena yang muncul dalam pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* diantaranya adalah masyarakat tidak mengertinya pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry*, belum adanya paguyuban yang terstruktur dan solid menjadikan tidak ada partisipasi dan pembahasan lebih lanjut dalam rangka pengembangan kampung tematik *home industry* sehingga usulan tidak terakomodasi secara optimal. Pelaku ukm di kampung tematik *home industry* masih memiliki kendala dalam hal pemasaran, bantuan modal, serta pelatihan dan pendampingan. Berbagai fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang, sekaligus faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut. Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini bersifat baru karena belum pernah ada peneliti lain yang meneliti tentang fokus dan lokus tersebut.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian berlandaskan postpositivisme dimana hasil penelitian adalah data yang ditemukan di lapangan (*field research*) tanpa manipulasi (Sugiyono, 2017: 07). Metode kualitatif memandang fakta sosial secara kompleks, utuh, holistik, terus bergerak (dinamis), bermakna, dan memiliki pola hubungan interaktif. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri atau *human instrument*, sehingga peneliti harus memiliki teori sebagai pegangan dan wawasan yang kaya sehingga mampu mengamati, bersifat kritis dengan bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan peneliti agar mendapatkan data yang mendalam dan bermakna.

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif ialah penelitian yang memberikan uraian atau gambaran dari suatu keadaan pada objek yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif tidak menggunakan hubungan antar variabel atau menarik generalisasi variabel penyebab dari suatu gejala atau kenyataan sosial melalui pengujian hipotesis. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada makna atau data sebenarnya di lapangan tanpa dimanipulasi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara empiris sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, uraian, gambaran dan catatan dalam keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Penelitian menggunakan metode penelitian yang bersifat data deskriptif dengan menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* serta faktor penghambat pemberdayaan

masyarakat melalui kampung tematik *home industry*. Dalam penelitian metode kualitatif data yang didapatkan dari narasumber memunculkan data deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti memerlukan informasi yang bermakna dan mendalam dengan melihat dan memahami fakta di lapangan lalu membandingkan dengan teori yang mendukung untuk melakukan analisis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry*.

1.8.2. Situs Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diambil mengenai pemberdayaan melalui kampung tematik *home industry* maka lokus penelitian yaitu Kampung tematik *home industry* yang berada di RW 5 Kel. Karanganyar Gunung Kec. Candisari Kota Semarang.

1.8.3. Subjek Penelitian

Informan merupakan individu atau seseorang yang dipandang dapat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif deskriptif ditentukan pada saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball*. Teknik *snowball* ialah teknik pengambilan informan sebagai sumber data dengan terus bergulir seperti bola salju yang menggelinding dan kian membesar sehingga didapatkan orang yang dianggap dapat memberikan peneliti data yang mendalam, bermakna serta objektif.

Informan dalam penelitian ini berasal dari Bappeda Kota Semarang, Kecamatan Candisari, Kelurahan Karanganyar Gunung, Ketua RW 5, Koordinator

kampung tematik *home industry*, serta masyarakat pelaku ukm di kampung tematik *home industry* untuk menggali informasi secara mendalam tentang pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry*.

1.8.4. Jenis data

Data dari segi jenisnya dibagi menjadi data kualitatif, kuantitatif, dan gabungan (Sugiyono, 2019: 9). Data kualitatif berbentuk kata, narasi, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, foto, gambar, dan bagan. Data kualitatif terdiri dari dua macam yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif empiris ialah data yang sebagaimana adanya yang berarti tidak diberi makna. Sementara data kualitatif bermakna ialah data dibalik fakta yang tampak dan lebih mendalam karena peneliti memberikan makna atau interpretasi terhadap fakta yang diperoleh di lapangan secara empiris.

1.8.5. Sumber Data

Pada penelitian pemberdayaan melalui program kampung tematik *home industry* menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari sumber asalnya. Data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara maupun observasi langsung. Pertanyaan wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada informan mengenai pemberdayaan melalui program kampung tematik *home industry*.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber asal. Data sekunder mendukung data primer. Data sekunder pada penelitian ini meliputi Surat Edaran, Surat Keputusan, laporan kinerja, Peraturan, RPJMD Kota Semarang, dan lain sebagainya.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang dibutuhkan dan ditetapkan. Menurut Sugiyono (2017: 225) teknik pengumpulan data secara umum dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Observasi

Teknik ini adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Observasi mengandung proses pengamatan dalam pelaksanaannya. Observasi untuk mendapatkan fakta mengenai keadaan sebenarnya di lapangan sehingga peneliti dapat bekerja berdasarkan data tersebut. Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati pemberdayaan melalui program kampung tematik *home industry*.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah bertanya langsung kepada informan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara atau interview akan menuntun peneliti untuk mengetahui secara mendalam bagaimana menginterpretasikan fenomena serta situasi di lapangan, yang tidak dapat didapatkan hanya melalui observasi. (Susan Stainback dalam Sugiyono, 2017: 232). Pengumpulan data melalui wawancara dapat menggunakan pedoman wawancara atau *interview guide* dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Wawancara dalam penelitian ini secara

langsung, formal dan terstruktur kepada informan yang terkait pemberdayaan kampung tematik *home industry*. Peneliti dalam mengumpulkan data dengan metode wawancara menggunakan alat bantu seperti buku, alat tulis, *handphone* untuk merekam serta dokumentasi.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2017: 231) mengemukakan dokumentasi sebagai catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, catatan, laporan, biografi, peraturan, regulasi, laporan kinerja dan kebijakan. Teknik pengumpulan dokumentasi melengkapi observasi dan wawancara karena peneliti dapat mencari dokumen-dokumen, data statistic atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian, baik berupa laporan dan arsip. Dokumentasi pada penelitian ini meliputi Surat Edaran, Surat Keputusan, laporan kinerja, Peraturan, RPJMD Kota Semarang, dan lain sebagainya.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2017: 241). Triangulasi juga menguji keabsahan data yaitu memeriksa kredibilitas data dengan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017: 244). Berikut langkah analisis data :

1. Reduksi data

Tindakan mengatasi data yang didapat peneliti dari lapangan dengan cara merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan bagaimana polanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan membatasi, memberikan gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya serta menggali lagi secara lebih dalam apabila dibutuhkan. Peneliti melakukan reduksi data terkait pemberdayaan melalui kampung tematik *home industry*.

2. Penyajian data

Penyajian data pada penelitian kualitatif juga sering menggunakan bentuk teks yang bersifat uraian atau narasi (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2017: 249). Selain itu penyajian data dapat berbentuk bagan, diagram, dan sebagainya. Langkah ini memudahkan peneliti untuk memahami fenomena serta merencanakan langkah selanjutnya. *Display data* dilakukan dengan mendeskripsikan tentang pemberdayaan melalui Kampung Tematik *home industry* dengan narasi serta menggunakan tabel yang membantu menjelaskan penelitian.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Tahap ini merupakan tahap ketiga dimana sebuah kesimpulan dapat bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Apabila kesimpulan telah didukung oleh bukti valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan tersebut kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa saja awalnya mampu menjawab rumusan masalah, namun juga bisa tidak menjawab rumusan masalah

karena rumusan masalah akan terus berkembang sesuai dengan fakta dan kondisi penelitian di lapangan. Hal ini yang menjadikan penelitian kualitatif adalah memunculkan teori atau temuan baru.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan dengan langkah pertama yaitu melakukan pengumpulan data melalui penelitian di lapangan dimana peneliti terjun langsung untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum dan mengelompokkan data, hasil reduksi data disajikan sehingga nantinya peneliti mudah dalam menarik kesimpulan.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data merupakan memeriksa keabsahan data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria seperti derajat kepercayaan, ketergantungan, keteralihan, dan kepastian. Pada penelitian kualitatif, kualitas data yang reliabel dan valid didapatkan dengan pengujian data. Data dinyatakan valid saat tidak ditemukannya perbedaan dari hasil penelitian dengan fakta di lapangan.

Pada penelitian ini, teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan dengan melakukan triangulasi. Sugiyono (2017: 273) mengemukakan bahwa triangulasi adalah suatu bentuk pengecekan data dari berbagai sumber, cara atau waktu. Teknik triangulasi dengan sumber berarti penulis membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan :

1. Membandingkan data hasil observasi dengan wawancara
2. Membandingkan data yang diungkapkan di depan umum dengan apa yang diungkapkan saat pembicaraan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan pendapat dari orang lain dengan perspektif berbagai pihak.
4. Membandingkan data wawancara dan observasi dengan berbagai dokumen yang berkaitan.

Penggunaan metode triangulasi menjadikan peneliti dapat memeriksa keabsahan data yang telah dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga derajat kepercayaan data dapat diperoleh dengan valid.